

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki posisi strategis dan penting, khususnya sebagai lalu lintas kejahatan transnasional. Salah satu aktivitas kejahatan transnasional yang sangat menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara adalah aktivitas perdagangan manusia, dimana kawasan ini menjadi pemasok terbesar perdagangan manusia. Data dari *International Organization for Migration (IOM)* menunjukkan bahwa Laos adalah negara yang menduduki peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara dengan total 195 korban perdagangan manusia di tahun 2011.

Mereka yang menjadi korban telah ditipu dengan iming-iming mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi di negara lain. Namun, pada akhirnya mereka di eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi kerja paksa maupun eksploitasi seksual. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh Laos dalam mengatasi permasalahan ini karena selain menjadi negara sumber untuk kasus perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan seksual, Laos juga merupakan negara transit bagi perempuan dan anak-anak.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan ketimpangan pendapatan dan kurangnya sumber daya untuk mengontrol daerah perbatasan adalah penyebab utama meningkatnya resiko perdagangan manusia di Laos. Pemerintah Laos pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, namun belum berhasil karena faktor lemahnya penegakan

hukum. Hingga pada tahun 2011 pemerintah Laos meminta bantuan pada UNODC untuk mengintervensi negaranya dalam memerangi perdagangan manusia. Melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan di Laos, UNODC pun mengklaim upaya yang dilakukannya telah mencapai tahap efektif dalam pengimplementasian Protokol Perdagangan Manusia.

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh UNODC yaitu, pertama UNODC melakukan penelitian dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia. Hasil nyatanya dapat dilihat dari Laporan Global tentang Perdagangan Manusia yang diterbitkan setiap dua tahun sekali. Kemudian kampanye di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia serta dampaknya.

Kedua, UNODC memastikan bahwa negara anggotanya telah meratifikasi dan mengimplementasikan Protokol Perdagangan Manusia secara efektif. Pada poin ini, Laos telah meratifikasi Konvensi dan *Trafficking Protocol* pada September 2003, namun belum mengimplementasikannya secara efektif. Oleh karena itulah, UNODC meningkatkan kapasitas pemerintah Laos dengan mengadakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas tentang Perdagangan Manusia dan mengadakan program pelatihan khusus bagi petugas garis depan untuk mendeteksi dan melarang perdagangan lintas batas.

Selain itu, dalam bidang peradilan pidana, UNODC telah berhasil menyusun dan memberlakukan UU anti-perdagangan manusia dan instruksi untuk memperkuat UU nasional tentang perdagangan manusia di Laos. Hal tersebut dilakukan dengan melatih 700 pejabat dari lembaga peradilan pidana di tingkat

provinsi dan kabupaten, mengatur pertemuan nasional dan regional untuk menyebarluaskan undang-undang, dan mengorganisir lokakarya tentang perdagangan manusia di tingkat nasional, bilateral dan regional. Dalam bidang perlindungan dan dukungan pada korban, UNODC menyediakan tempat tinggal, pelayanan medis, dukungan hukum, pendidikan, pelatihan, peluang kerja, memberi dukungan finansial serta mendukung proses reintegrasi dan pemulihan korban.

Ketiga, UNODC memperkuat kemitraan dan koordinasinya dengan organisasi yang sejalan dengan fungsi dan tujuan UNODC, seperti ICAT (Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons), UN.GIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking) dan GMG (Global Migration Group). Dari penjelasan diatas, UNODC telah melakukan ketiga komponen dalam Protokol Perdagangan Manusia untuk mengatasi perdagangan manusia di Laos. Keberhasilan UNODC yang paling terlihat terdapat di bidang peradilan pidana yang memang menjadi fokus tugas dari UNODC.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap penelitian ini bisa memberi gambaran permasalahan *human trafficking* atau perdagangan manusia yang terjadi di suatu negara dan gambaran upaya yang dilakukan oleh badan naungan PBB dalam mengatasi permasalahan tersebut. Diharapkan UNODC dapat terus menjalankan tugasnya dalam memerangi narkoba, kejahatan transnasional, dan terorisme di seluruh dunia.